

# **Komunikasi Politik Partai Terbuka *ala* PKS**

*Sri Herwindya Baskara Wijaya*

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

## ***Abstract***

*Partai Keadilan Sejahtera (PKS) as one of politic party in Indonesia. It is include Islamic party with position is developing enough in political life in Indonesia. One of decision from the party in National Conggres II, June 16-20 in 2010 in Jakarta is PKS become opened party to all citizen without see background religion, group, culture, etc. include opened member in party from nonmuslim. But PKS ideology is still Islam. Seeing reason why PKS become opened party can be seem based on four perspective. They are perspective of ideology, sociology, history and politic. The political policy of PKS in communication political perspective actually as part from propaganda. To promote the new identity political party, PKS applicate two sort of propaganda are "The Transfer"(message association) and "Plain Folk"(message identification). The paper try to explain some reason why PKS become opened party based on politic communication perspective. It is hoped can introduce more face of the party which it claimed the dakwah party.*

***Key words*** : *politic party, opened party, political communication*

## **Pendahuluan**

Salah satu hasil Musyawarah Nasional Ke-2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 16-20 Juni 2010 di Jakarta adalah menjadikan PKS sebagai partai terbuka (inklusif). Diantara orientasi yang ditonjolkan dari pilihan terbuka ini adalah mencoba melegalformalkan keanggotaan kalangan nonmuslim. Hal ini didasarkan atas pertimbangan signifikansi dukungan sebagian kalangan nonmuslim di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya nonmuslim seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Implikasinya, PKS saat ini memiliki 20 anggota legislatif daerah dari kalangan nonmuslim terutama di kawasan Papua. Sebenarnya kebijakan PKS menjadi partai terbuka telah bergaung saat PKS menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali dari tanggal 1-3 Februari 2008.

Bagi siapapun yang intens mengamati sepak terjang PKS selama ini, tentu kebijakan ini menarik untuk dicermati mengingat partai ini dikenal sebagai partai Islam. Bahkan sebagian pihak melabeli dengan istilah sebagai partai Islam-kanan mengingat partai ini dikonstruksi dari akar massa utama yang banyak menggunakan simbol-simbol eksklusif *ala* Timur Tengah. Namun jika diteropong secara diskursus keilmuan terutama dari perspektif ilmu politik dan ilmu komunikasi seperti komunikasi politik, kebijakan PKS ini bukanlah hal aneh mengingat PKS adalah sebuah partai politik yang tentu akan bereproduksi melakukan aneka manuver komunikasi politik dalam berbagai arusnya. Tujuan utama partai politik apapun haluannya baik partai sekuler maupun partai agama adalah kekuasaan.

Sehingga, metamorfosis apapun yang dilakukan partai-partai politik adalah dalam rangka meraih dukungan seluas-luasnya dari publik untuk meraih, mengelola sekaligus mempertahankan kekuasaan. Pendek kata, kebijakan PKS menjadi partai terbuka tidak lepas sama sekali dari orientasi kekuasaan. Setidaknya hal ini sangat tampak dari target-target PKS untuk meraup suara pemilih sebanyak-banyaknya. Bahkan pada Pemilu 2014, PKS telah menargetkan meraih tiga besar suara pemilih nasional.

### **Perspektif**

Mengenai kebijakan PKS menjadi partai terbuka, jika dilihat dari perspektif komunikasi politik, maka pilihan keterbukaan ala PKS ini sejauh pengamatan penulis setidaknya menyiratkan pengertian tertentu. Sebagai komunikator, PKS mencoba menyampaikan pesan tertentu kepada publik Indonesia yang notabene sebagai komunikan PKS. Pesan yang disampaikan berupa kebijakan PKS menjadi partai terbuka.

Menurut penulis, pesan PKS ini tidak lepas dari strategi pencitraan diri untuk mempromosikan partainya agar sampai tingkat tertentu diterima atau lebih diterima publik dalam rangka meraih kekuasaan. Hal ini, sekali lagi, mengingat bahwa berbicara politik tidak lepas dari pembicaraan mengenai bagaimana meraih kekuasaan, mengelola kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana

dikatakan Miriam Budiardjo (2008: 18) bahwa sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan PKS lebih membuka diri menjadi partai terbuka sejauh pengamatan penulis setidaknya dapat dilihat dari empat perspektif yaitu perspektif ideologis, sosiologis, historis dan politis.

#### **a. Perspektif Ideologis**

Perspektif ini melihat aspek ideologis PKS. Seperti yang jamak diketahui, PKS merupakan partai yang berideologi Islam. Karena landasan ideologisnya, posisi ini menempatkan PKS sebagai salah satu partai politik Islam di Indonesia. Jika dilihat lebih dalam lagi berdasarkan peta pemikiran (fikrah) dalam dunia Islam, PKS banyak mengadopsi pemikiran Islam ala *Harakah Islamiyah Ikhwanul Muslimin* (IM) yang didirikan Hassan Al Banna di Mesir tahun 1928. Sebagian kalangan (terutama Barat) melihat IM sebagai organisasi “Islam fundamentalis” (Sekamdo, 2001).

Mengingat praksis PKS banyak terinspirasi IM, lebih jauh sebagian pihak menilai PKS adalah bagian secara struktural dari IM internasional yang memiliki keterkaitan dengan IM di Mesir, negeri kelahiran IM kali pertama. Setidaknya persepsi ini dilontarkan pakar fikih (hukum Islam) kontemporer yang juga salah satu tokoh IM sendiri, Dr. Yusuf Qardhawi yang menyebut Partai Keadilan / PK (saat sebelum berubah nama menjadi PKS) adalah perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir (Qardhawi, 2001). Pernyataan ini merupakan catatan akhirnya abad ke-20 ketika menyoroti perkembangan politik Indonesia di penghujung abad.

Selain Dr. Yusuf Qardhawi, sinyalir PKS memiliki relasi dengan IM adalah Adian Husaini (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam / KISDI) (Sekamdo, 2001: 48). Hasreiza mencatat pandangan Dr. Yusuf Qardhawi terkait penilaian relasi PKS dengan IM :

“Adalah Dr. Yusuf Al-Qardhawi (2001) yang menyebutkan dalam bahwa PKS di Indonesia adalah perpanjangan tangan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir. Sebuah jamaah yang didirikan oleh Hasan Al-Banna sejak tahun 1928 yang lalu dan kini telah memiliki cabang di 70 negara dunia. Namun tulisan ulama yang kini bermukim di Qatar itu belum pernah mendapat konfirmasi dari para pengurus DPP PKS” (Hasreiza, 2010).

PKS sendiri membantah memiliki keterkaitan dengan IM. Orang-orang PK (PKS) lebih sering mengatakan bahwa memang mereka mengambil metode dakwah Ikhwan tetapi bukan berarti mereka Ikhwan (Sekamdo, 2001: 48). Sekjen PKS, Anis Matta juga membantah pernyataan Dr. Yusuf Qardhawi yang menyatakan PKS adalah kepanjangan tangan Ikhwanul Muslimin tapi dirinya membenarkan bahwa salah satu gerakan yang paling dekat dengan pemikiran Gerakan Ikhwan di Indonesia adalah PKS. Begitu pula dengan pernyataan Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS) yang beranggapan bahwa substansi pemikiran itu lebih penting dari nama besar Ikhwanul Muslimin sekalipun (Rathomy, 2007: 54).

Selain dituding memiliki keterkaitan dengan IM internasional, sebagian pihak lain menilai PKS memiliki relasi dengan Wahabi, sebuah sekte agama Islam yang didirikan Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab Saudi. Sekte ini sekarang menjadi madzab resmi keagamaan Kerajaan Arab Saudi dimana pemahaman keagamaan kaum Wahabi dinilai relatif berbeda dengan pemahaman keagamaan umat Islam di Indonesia yang mayoritas berpaham Islam Sunni “moderat” *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Aswaja) khususnya bermadzab Syafi’i.

Namun tudingan ini dibantah para petinggi PKS bahwa PKS bukanlah Wahabi seperti yang dituduhkan sebagian pihak selama ini. Paling tidak pandangan ini disampaikan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid yang membantah isu yang menyebutkan PKS dan dirinya adalah bagian dari Gerakan Wahabi. Isu yang memojokkan itu digunakan agar umat Islam tidak memilih PKS ([www.us.detiknews.com](http://www.us.detiknews.com)).

Meski membantah sebagai bagian dari gerakan Wahabi, Arief Ihsan Rathomy dalam bukunya “PKS & HTI : Genealogi & Pemikiran Demokrasi”

mengategorikan Gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) banyak dipengaruhi gerakan dakwah Syekh Abdul Wahab, Sanusiyyah dan Rasyid Ridha yang merupakan kelanjutan dari Madrasah Ibnu Taimiyah (wafat 728 H/1328 M) yang juga merupakan kelanjutan dari Madrasah Imam Ahmad bin Hanbal (Rathomy, 2007: 211). Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali adalah salah satu imam dari empat madzab besar Sunni dalam Dunia Islam (lahir di Baghdad 163 H/wafat 241 H) (Abdusshomad, 2003: 3).

Dari akar sejarahnya, PKS sendiri didirikan oleh banyak anggota yang terlibat dalam Gerakan Tarbiyah, sebuah komunitas muslim yang banyak berkembang di kampus-kampus perguruan tinggi termasuk di Indonesia melalui kelompok-kelompok *usrah*. Yon Machmudi (2005, dalam Nashir, 2006: 15) menyebut Gerakan Tarbiyah sendiri yang mendapatkan pengaruh dari gerakan Ikhwanul Muslimin mulai mengokohkan eksistensinya di Indonesia dengan mendirikan partai Islam bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKS menjadi sebuah partai terbuka tampaknya adalah sebagai upaya PKS melepaskan diri dari bayang-bayang stigma miring (*stereotype*) secara sepihak oleh sebagian kalangan yang menganggap PKS sebagai komunitas dan gerakan Islam sekaligus partai Islam eksklusif dan fundamentalis yang dinilai memiliki kaitan struktural dengan IM dan Wahabi. Maka, melalui kebijakan menjadi partai terbuka, PKS setidaknya berupaya menggeser citra diri di mata publik Indonesia dan juga publik internasional bahwa PKS adalah komunitas muslim sekaligus partai politik Islam yang moderat dan inklusif bagi semua golongan baik golongan muslim maupun nonmuslim.

Dalam konteks menjadi partai terbuka tersebut, PKS terlihat mencoba mengkonstruksi ideologinya menjadi lebih “longgar” sesuai dengan fakta kondisi Indonesia. Mengingat PKS sebagai partai berideologi Islam, maka konstruksi pemaknaan “terbuka” tentu saja sarat dengan pemaknaan atas sumber-sumber baku hukum Islam (Alquran dan As-Sunnah) sebagai rujukan utama partai tersebut dengan penafsiran yang lebih “longgar” atau “moderat” sesuai dengan konteks realitas Indonesia.

Pandangan penulis ini dikuatkan pernyataan Ketua Majelis Syuro PKS saat ini, Hilmi Aminudin yang mengatakan deklarasi PKS sebagai partai tengah dan terbuka bukan sekadar strategi, tetapi merupakan pelaksanaan ajaran Islam. PKS menerima pluralitas sebagai ketentuan Tuhan bahwa tidak ada keseragaman tetapi keberagaman. Penerimaan PKS atas pluralitas muncul dari keyakinan dan keimanan. Eksklusivitas tidak mencerminkan ajaran Islam (*politik.vivanews.com*).

#### **b. Perspektif Sosiologis.**

Perspektif ini dapat dilihat dari aspek sosiologis Indonesia sebagai bangsa majemuk dengan beragam latar belakang suku, agama, ras dan antargolongan (Sara). Kondisi ini merupakan fakta tak terbantahkan sejak bangunan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia terbentuk sedari awal berdirinya tahun 1945, bahkan jauh hari sebelum itu. Zulkifli Husin (2003: xv) menyebut ratusan etnik, budaya, agama, adat istiadat dan bahasa tersebar di lebih 13.000 pulau besar dan kecil dari Sabang hingga Merauke. Pluralisme multidimensional inilah yang merupakan rahmat untuk membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona.

Hefner (2001, dalam Azra, 2007: 10-19) memandang pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia dan Singapura sangat mencolok; terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini – khususnya Indonesia – sebagai “lokus klasik” bagi konsep “masyarakat majemuk/plural” (*plural society*) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnival (1944, 1948). Azyumardi Azra (2007) melihat keragaman atau kebhinekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan Indonesia di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan waktu-waktu mendatang.

Sehingga di sini terlihat bahwa kebijakan inklusifitas PKS ini menunjukkan bahwa PKS mulai mencoba lebih responsif atas realitas kemajemukan Indonesia. Kondisi ini menjadikan rakyat Indonesia yang multilatar

belakang tersebut menginginkan ideologi kebangsaan dan kenegaraan baik struktural maupun kultural yang bisa menampung keberagaman entitas anak bangsa ini tanpa memandang latar belakang basis-basis primordialnya. PKS sepertinya berusaha menembus lintas sekat-sekat sosiologis masyarakat Indonesia melalui politik inklusifitasnya.

Pandangan penulis ini setidaknya tercermin dari sikap PKS paska mendeklarasikan diri menjadi partai terbuka bahwa kemajemukan bangsa Indonesia adalah fakta sosiologis. Pandangan ini setidaknya dikemukakan Presiden PKS saat ini, Luthfi Hasan Ishaq yang mengatakan bahwa PKS menghargai pluralitas. Pluralitas Itu fakta di lapangan yang harus diterima. Islam mengakui pluralitas ([www. bataviase.co.id](http://www.bataviase.co.id)).

### c. **Perspektif Historis**

Perspektif ini mencoba melihat dari proses kesejarahan Indonesia yang menghasilkan konsensus nasional bahwa negara Indonesia adalah bukan negara agama melainkan negara kebangsaan yang menampung semua kepentingan anak bangsa. Untuk itu pendiri bangsa (*founding father*) menyepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang dinilai mampu merespons fakta sosiologis Indonesia sebagai bangsa majemuk.

Zulkifli Husein (2003) mencatat ketika Republik tercinta ini dibangun, para pendiri sangat menyadari adanya kemajemukan sebagai sebuah realitas sosial budaya yang tidak dapat dimungkiri eksistensinya. *Bhinneka Tunggal Ika – “berbeda-beda tetapi satu jua”* – jelas merefleksikan keinginan yang kuat para pendiri untuk menjadikan Indonesia ‘*nation*’ baru yang kuat. Pancasila oleh para pendiri bangsa dianggap sebagai ideologi terbaik yang mampu menjawab keragaman Indonesia.

Sehingga menurut Abdurrahman Wahid (The Wahid Institute, 2006: 17), para pendiri bangsa sadar bahwa Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama, yang dalam ajaran Islam dikenal

sebagai *maqashid al-syariah* yaitu kemaslahatan umum (*al-maslahat al-'ammah, the common good*).

Dengan kesadaran demikian mereka menolak pendirian atau formalisasi agama dan menekankan substansinya. Mereka memposisikan negara sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan dan melindungi segenap keyakinan, budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Dengan cara demikian melalui Pancasila mereka menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmatan lil alamin*) dalam arti sebenarnya (*Ibid, 2006: 17*).

Maka tidak heran, hingga kini Pancasila sebagai ideologi negara masih tetap merupakan satu-satunya ideologi yang secara dinamis dan harmonis dapat menampung nilai-nilai keanekaragaman agama maupun budaya sehingga Indonesia kokoh dan utuh untuk tidak terjebak menjadi negara agama (teokrasi) maupun menjadi negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai agama (Misrawi, 2010: 275).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan PKS menjadi sebuah partai terbuka adalah tidak lepas dari pertimbangan partai politik tersebut atas aspek historis bangsa Indonesia atas ideologi bangsanya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mengingatkan sebagian pihak masih memandang perspektif ideologi PKS dikesani cenderung “kanan”, bahkan muncul stereotip yang dianggap oleh PKS sebagai fitnah bahwa PKS tidak menerima Pancasila sebagai ideologi (dasar negara) bangsa Indonesia.

Stereotip bahwa PKS tidak menerima Pancasila dibantah PKS. Setidaknya pandangan ini dikemukakan salah seorang tokoh PKS, Abdul Malik yang menyatakan melalui *platform*-nya, PKS telah menjelaskan bahwa PKS punya wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. NKRI yang berdasarkan Pancasila sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi (*www.reformata.com*).

Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring juga membantah PKS tuduhan sebagian pihak bahwa tidak menerima Pancasila. Tifatul mengemukakan :

“PKS adalah partai anak muda yang taat konstitusi, koridor demokrasi dan Negara Republik Indonesia. (PKS) tidak ada niat mendirikan negara Islam



di Indonesia, yang diperjuangkan adalah mendirikan tatanan madani atau *civil society*. Konsepnya adalah Piagam Madinah. ([www.reformata.com](http://www.reformata.com)).

Ketua DPP PKS Mustafa Kamal di sela Musyawarah Nasional (Munas) PKS 2009 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta juga mengemukakan pandangannya serupa bahwa PKS akan semakin menghargai wacana kebangsaan dalam bingkai negara Indonesia yang berasas Pancasila. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

“Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama tidak perlu dipersoalkan lagi. PKS tidak bisa lagi mengklaim sebagai partai yang paling agamis, karena sekarang seluruh partai dan masyarakat semakin baik dalam keberagamaannya. Meski PKS tetap berasas Islam, partai bulan sabit kembar ini tidak akan mengotak-atik Pancasila sebagai dasar negara. Justru menjadikan Pancasila sebagai ukuran kemajuan bangsa Indonesia” ([www.inilah.com](http://www.inilah.com))

Untuk membuktikan kepada berbagai pihak bahwa PKS komitmen pada konstitusi negara, maka PKS (waktu itu bernama Partai Keadilan / PK dan tergabung dalam Fraksi Reformasi bersama Partai Amanat Nasional (PAN)) ikut serta menolak pemberlakuan Piagam Jakarta pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 tentang usul perubahan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan mengajukan klausul “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya” (Mashad, 2008: 249). Piagam Jakarta sendiri berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Maka dapat disimpulkan di sini bahwa berdasar pertimbangan historitas ideologis bangsa Indonesia, kebijakan PKS menjadi partai terbuka adalah pilihan realistis melalui keberterimaan atas ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. PKS pun mencoba meng-*counter* pandangan-pandangan miring sebagian pihak yang menyebut PKS tidak menerima Pancasila melalui kebijakan partai terbuka yang *welcome* atas Pancasila. Jika tidak di-*counter* dengan sikap yang jelas, maka stereotip tersebut secara komunikasi politik dinilai bisa menjadi “batu sandungan” bagi PKS untuk lebih bisa diterima di masyarakat Indonesia yang majemuk ini sekaligus menjadi sebuah partai politik yang besar.

#### **d. Perspektif Politis**

Perspektif ini mencoba melihat aspek politis dari kebijakan PKS menjadi partai terbuka. Menurut penulis, kebijakan PKS menjadi partai terbuka secara politis dapat diamati melalui dua sudut pandang yaitu perspektif pragmatisme politik dan perspektif dinamika politik internal partai.

(1) Dari perspektif pragmatisme politik, pilihan PKS mengubah baju partainya dari partai dengan kesan “eksklusif” menjadi partai lebih “inklusif” tidak lepas dari target-target politik praktis PKS terutama terkait perolehan suara pada Pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Parlemen (DPR dan DPRD). Bahkan PKS sendiri secara politik telah menargetkan masuk dalam tiga besar nasional dengan raihan suara minimal 15% suara nasional pada Pemilu 2014 mendatang.

Maka tidak mengherankan jika kemudian berbagai terobosan dilakukan PKS untuk mewujudkan target tersebut diantaranya adalah dengan menjadikan PKS sebagai partai terbuka sebagai pesan utama politiknya. Dengan kebijakan ini, diharapkan agar pesan politik PKS menjadi sebuah partai terbuka bisa menjadi propaganda ampuh yang bisa diterima masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pemilih pada Pemilu 2014 mendatang tanpa tersekat oleh batas-batas primordial suku, agama, ras dan antargolongan (Sara).

Hal ini paling tidak terbukti tatkala PKS yang pada Pemilu 1999 bernama Partai Keadilan (PK) hanya memperoleh 1,6% atau 1,4 juta suara nasional. Hal ini tidak lepas dari penggunaan simbol-simbol kelompok maupun pesan-pesan komunikasi politiknya yang relatif terkesan “eksklusif” di mata umumnya masyarakat Indonesia. Akan tetapi kemudian pada Pemilu 2004, peraihan suara PKS (metamorphosis PK) melonjak menjadi 7,3% atau 8,3 juta suara nasional dan Pemilu 2009 meraih 7,8% atau 8,2 juta suara nasional.

Kenaikan suara PKS ini tidak lepas dari pesan komunikasi politik PKS yang didesain tampil lebih “terbuka” dengan tidak mengusung lagi pesan-pesan politik yang dinilai terlalu sempit seperti tema-tema bernuansa agama (Islam), namun melainkan pesan-pesan politik bersifat umum yang relatif “welcome” bagi publik luas. Maka mendasarkan diri dari pengalaman Pemilu 1999, 2004 dan

2009, PKS sepertinya mengambil konklusi bahwa menjadi sebuah partai terbuka bagi semua golongan adalah pilihan tepat untuk meraih dukungan suara semaksimal mungkin dari pemilih.

**Tabel 1**  
**Suara PKS pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009**

Pemilu	No.Urut Pemilu	Rating Perolehan Suara	Suara Pemilih	Persentase	Kursi di DPR	Presentase
<b>Pemilu 1999</b>	24	7	1.436.565	1,35%	7	1,51%
<b>Pemilu 2004</b>	16	6	8.325.020	7,34%	45	8,18%
<b>Pemilu 2009</b>	8	4	8.206.955	7,88%	59	10,54%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

(2) Sementara itu, jika dianalisis dari perspektif dinamika politik internal partai adalah kemenangan salah satu faksi di PKS (para pengamat politik menyebutnya dengan istilah “Faksi Kesejahteraan atau Faksi Pragmatis-Realitis atau Faksi Moderat”) yang lebih menghendaki agar PKS menjadi partai lebih “longgar”, realistis dengan peta kondisi di lapangan, agresif dalam menarik dukungan di luar basis masa Islam dengan terobosan-terobosan yang lebih berani. Sementara faksi satunya adalah (para pengamat politik melabelinya dengan istilah “Faksi Keadilan atau Faksi Idealis-Ideologis atau Faksi Fundamentalis”) lebih menghendaki PKS tetap di jalur awal sebagai partai “kanan” atau masih setia pada PKS 'lama' dengan nilai-nilai Islam yang kental dan konservatif.

Sebagaimana pandangan pakar politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi bahwa “Faksi Kesejahteraan” dimotori oleh Sekjen PKS Anis Matta, anggota FPKS DPR Fachry Hamzah dengan sokongan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Dengan komposisi seperti ini, faksi ini sangat besar pengaruhnya di internal PKS. Keputusan menjadi partai tengah merupakan kemenangan “Faksi Kesejahteraan.” Komunikasi intensif ke Amerika Serikat, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang final, sampai jalur nonmuslim, termasuk partai tengah, adalah (sebagai) bentuk sikapnya (<http://www.indonesia-monitor.com>).

Pakar politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menyebut kader PKS yang dididik di dalam negeri dan berakar dari Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) masuk kelompok moderat (“Faksi Kesejahteraan”) yang berpikir lebih rasional. Sementara “Faksi Keadilan” antara lain terutama dimotori Abu Ridho, Mashadi, dan Hidayat Nur Wahid (<http://www.indonesia-monitor.com>).

Abu Ridho adalah tokoh yang sangat berjasa dalam menerjemahkan kitab-kitab Ikhwanul Muslimin ke Bahasa Indonesia. Abu Rido adalah juga yang membumikan Gerakan Tarbiyah di Indonesia menjadi Lembaga Dakwah Kampus (LDK), KAMMI pada 1998, sampai Partai Keadilan (PK) pada 1999, yang kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2003. Mashadi saat ini menjadi Ketua Umum Forum Umat Islam (FUI). Sedangkan Hidayat Nur Wahid yang sebelumnya sempat menjadi Ketua MPR Periode 2004-2009, kini duduk sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2009-2014 (<http://www.indonesia-monitor.com>).

Sebagaimana berbagai penilaian miring sebagian kalangan kepada PKS, para petinggi PKS juga membantah telah mengalami perpecahan internal dengan kemunculan polarisasi “Faksi Kesejahteraan” dan “Faksi Keadilan”. Setidaknya penolakan ini dikemukakan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid yang menolak anggapan bahwa partainya telah berubah menjadi partai pragmatis, seperti partai politik lain. Selain itu di internal partai (PKS) juga tidak ada dikotomi kelompok atau faksi keadilan dan faksi kesejahteraan, sebagaimana anggapan selama ini. ([www.female.kompas.com](http://www.female.kompas.com)).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan di sini bahwa kebijakan PKS menjadi partai terbuka dari perspektif politik tidak lepas dari adanya unsur pragmatisme politik dan juga dinamika politik di internal partai tersebut. Paparan analisis penulis di atas setidaknya sampai tingkat tertentu berusaha membuktikan adanya pengaruh kedua unsur tersebut (pragmatisme politik dan dinamika internal partai) yang secara perspektif politik ikut mempengaruhi lahirnya kebijakan PKS menjadi partai terbuka.

## **Propaganda**

Lepas dari apapun persepsi yang berkembang di lapangan, sebagai sebuah partai politik bahwa perubahan kebijakan PKS menjadi partai terbuka merupakan bagian dari komunikasi politik partai yang muaranya terkait dalam rangka mendapatkan dukungan luas dari masyarakat untuk memperkuat posisinya dalam pusaran kekuasaan. PKS mencoba mempromosikan diri agar posisinya lebih bisa diterima publik melalui strategi pencitraan diri sebagai partai terbuka bagi semua elemen anak bangsa. Jika dilihat dari sudut pandang komunikasi politik lebih jauh, kebijakan PKS menjadi partai terbuka adalah bagian dari propaganda partai.

Nurudin mengutip definisi *Everyman's Encyclopedia* menyebutkan bahwa propaganda adalah suatu seni untuk penyebaran dan meyakinkan suatu kepercayaan, khususnya suatu kepercayaan agama atau politik. Sementara Harold D. Lasswell dalam bukunya *Propaganda Technique in The World War* (1927) menyebutkan propaganda adalah semata-mata kontrol opini yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mempunyai arti atau menyampaikan pendapat yang konkret dan akurat (teliti) melalui sebuah cerita, rumor, laporan, gambar-gambar dan bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan dalam komunikasi sosial (Nurudin, 2001: 9-10).

Jika difokuskan lebih mendalam lagi berdasarkan teknik propaganda menurut Alfrad McClung, Lee dan Elizabeth Briant Lee (dalam Karthubij, 2000: 41), sejauh pandangan penulis, PKS setidaknya mempraktikkan dua teknik propaganda yaitu "The Transfer" dan "Plain Folk".

### **a. *The Transfer***

"The Transfer" adalah teknik propaganda dengan mengaitkan atau mengasosiasikan ide-ide dengan sesuatu hal yang disanjung oleh khalayak luas sehingga nantinya mereka (khalayak) akan mudah menerima propaganda itu (Alfrad McClung, Lee dan Elizabeth Briant Lee dalam Karthubij, 2000: 41). Sementara Nurudin (2001: 32) menyebut "The Transfer" meliputi kekuasaan, sanksi dan pengaruh sesuatu yang lebih dihormati serta dipuja dari hal lain agar membuat "sesuatu" lebih bisa diterima.

Dalam konteks ini, PKS mencoba menggunakan ide-ide umum yang berlaku di masyarakat luas sebagai pesan politiknya agar eksistensinya baik sebagai sebuah komprador politik sekaligus sebagai sebuah komunitas Islam agar lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ide-ide umum yang dimaksud adalah fakta sosiologis kemajemukan bangsa Indonesia yang terwadahi melalui representasi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai pilar-pilar kebangunan bangsa Indonesia.

Termasuk di sini adalah pengasosiasian ide-ide umum bahwa PKS adalah bagian dari Islam moderat mengingat mayoritas muslim Indonesia memiliki pemahaman Islam yang moderat (pertengahan). Islam moderat sendiri dipandang sebagai model penafsiran secara teologis atas ajaran Islam yang dinilai lebih sesuai, lebih terbuka dan lebih bisa menerima fakta pluralitas dunia termasuk fakta kemajemukan bangsa Indonesia.

Maka pilihan menjadi partai terbuka adalah pilihan yang rasional bagi PKS mengingat partai terbuka dianggap sebagai wadah terbaik yang bisa menampung pluralitas bangsa Indonesia melalui representasi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan maupun asosiasi sebagai bagian muslim moderat. Maka melalui penggunaan teknik propaganda ini, diharapkan PKS bisa lebih hadir dan diterima semua komponen anak bangsa meskipun secara ideologi PKS secara tegas tetap menganut ideologi Islam.

#### **b. *Plain Folk***

Selain itu sejauh pandangan penulis, PKS setidaknya menerapkan teknik propaganda “Plain Folk”. Menurut Nurudin (2001: 33), “Plain Folk” adalah propaganda dengan menggunakan cara memberi identifikasi terhadap suatu ide. Teknik ini mengidentikkan yang dipropagandakan milik atau mengabdikan kepada komunikan. PKS menggunakan istilah “partai terbuka” sebagai identifikasi terhadap ide kemajemukan bangsa Indonesia.

Dengan mencoba mentransformasikan propaganda “partai terbuka”, diharapkan masyarakat Indonesia yang serba plural ini bisa lebih menerima

eksistensi PKS sebagai bagian dari anak bangsa termasuk dalam bagian dari muslim moderat sebagai bagian terbesar dari masyarakat muslim Indonesia. Dengan propaganda ini pula, sebagai sebuah partai politik yang bergerak dalam ranah politik praktis, PKS mengharapkan agar mendapat dukungan luas dari pemilih dalam setiap pesta demokrasi termasuk dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang.

Sejarah politik Orde Baru sendiri mencatat Golkar pernah mempropagandakan Soeharto sebagai “milik rakyat” serta dikehendaki rakyat (meskipun rakyat mana, tidak begitu jelas) dan ia kembali terpilih pada SU MPR tahun 1998. PDI juga pernah mengklaim sebagai partai “wong cilik”. Seolah hanya partai tersebutlah yang bisa mewakili kelas tersebut. Tak terkecuali dengan PPP mengklaim diri sebagai “partai yang mewakili aspirasi umat Islam” dan seolah menganggap partai lain “tidak Islami.” Apalagi dalam kampanyenya juga sering menggunakan ayat-ayat Alquran. (*Ibid*, 2001: 33).

Penulis melihat “Plain Folk” mengutip pandangan Firmanzah (2007: 250) sebagai bagian sebuah konstruksi *image*. Image politik sebagai suatu strategi *positioning* dapat menjadi salah satu sumber penentu kemenangan partai politik dalam persaingan dengan partai-partai lainnya. *Positioning* dalam hal ini adalah suatu strategi yang mencoba menempatkan suatu ideologi partai diantara ideologi-ideologi lain di benak masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu partai politik melalui *image* dan citra yang tertanam dalam sistem keyakinan dan kognitif mereka.

Konstruksi *image* politik memiliki tiga dimensi utama yaitu (1) *image* politik adalah identitas politik partai politik; (2) *image* politik membantu pemilih dalam memilih partai politik berdasarkan ideologi dan program kerja yang ditawarkan; dan (3) *image* politik dapat mengurangi resiko psikologis dan ketidakpastian pemilih ketika mereka masuk menjadi anggota partai dan memberikan suaranya kepada partai tersebut dalam pemilihan umum (*Ibid*, 2007: 252-253).

Dalam hal ini, *image* yang dikonstruksi PKS agar meresap di benak masyarakat Indonesia yang majemuk ini adalah *image* PKS sebagai partai terbuka

yang menerima keberagaman bangsa tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan (Sara). Dengan demikian sekali lagi diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih terbuka dan massif menerima dan mendukung PKS termasuk dalam ranah kepentingan Pemilu.

## **Penutup**

PKS yang dulu awalnya berdirinya tahun 1999 bernama Partai Keadilan (PK) saat ini telah menapak menjadi sebagai partai menengah yang relatif diperhitungkan di kancah perpolitikan di Indonesia dewasa ini. Dalam perjalanannya, PKS terlihat mengalami metamorfosis dari partai berhaluan Islam dengan kesan awalnya “eksklusif” kini mencoba bergeser biduk menjadi lebih “inklusif”.

Setidaknya Musyawarah Nasional Ke-2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 16-20 Juni 2010 di Jakarta adalah tonggak penting bagi partai berlambang padi diapit bulan sabit emas ini menjadi sebuah partai terbuka (inklusif). Diantara orientasi yang ditonjolkan dari pilihan terbuka ini adalah mencoba melegalformalkan keanggotaan kalangan nonmuslim. PKS sepertinya sedang melakukan terobosan atau lebih akrab diistilahkan oleh kalangan Islam politik sebagai “ijtihad politik” dengan menjajakan isu inklusifitas sebagai kebijakan baru partainya.

Mendasarkan diri atas pertimbangan fakta di lapangan berdasar perspektif ideologis, sosiologis, historis maupun politis, PKS mencoba melakukan sebuah akrobat politik melalui praksis “keterbukaan” sebagai kebijakan baru partai. Strategi baru ini merupakan bentuk komunikasi politik partai dengan harapan agar masyarakat Indonesia baik secara struktural maupun kultural lebih menerima PKS.

Lebih jauh dari perspektif komunikasi politik, kebijakan “partai terbuka” ala PKS ini sebagai bagian dari propaganda partai. “The Transfer” (mengasosiasikan ide-ide) dan “Plain Folk” (identifikasi ide) menjadi diantara teknik propaganda yang dipraktikkan PKS yang memasarkan pesan politik “partai



terbuka” itu. Sebuah partai yang dikonstruksi menjadi payung besar semua anak bangsa tanpa membedakan entitas suku, agama, ras dan antargolongan (Sara).

Seperti yang diungkapkan Firmanzah (2007: 259-260), dalam komunikasi politik, strategi mengemas pesan politik merupakan hal yang sangat penting. Tujuan utama dari pesan politik adalah menggerakkan masyarakat (yang dalam hal ini adalah menggerakkan masyarakat Indonesia untuk lebih menerima dan memilih PKS khususnya saat Pemilu).

### **Daftar Pustaka**

- Tim Periset. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: PT Desantara Utama Media. Diterbitkan atas kerja sama Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Ma'arif Institute.
- Nashir, Haedar. (2006). *Manifestasi Gerakan Tarbiyah Bagaimana Sikap Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Karthubij, Susanto. (2000). *Komunikasi Politik: Pengantar Wacana*. Surakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik antara Pemahaman dan Realitas*. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Husin, Zulkifli, dkk. (2003). *Hidup Berbangsa Etika Multikultural*. Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya.
- Azra, Azyumardi. (2007). *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Impulse (Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies).
- Mashad, Dhurorudin. (2008). *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdusshomad, Muhyiddin. (2005). *Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*. Malang: Pustaka Bayan bekerja sama dengan PP Nurul Islam Jember dan Khalista Surabaya.
- Rathomy, Arief Ihsan. (2005). *PKS & HTI: Genealogi & Pemikiran Demokrasi*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sekamdo, Aga. (2001). *Membumikan Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis atas Proses Internasionalisasi Gerakan Ikhwan*. Solo: Era Intermedia.

Qardhawi, Yusuf. (2001). *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*. Solo: Era Intermedia.

Misrawi, Zuhairi. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hasreiza. (2010). *PKS Sebagai Kekuatan Politik Gerakan Tarbiyah Indonesia dan Pemilu*, diakses dari <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=17253>, tanggal 4 Maret 2011.

*Analisis Pengamat : Anis Di-back Up Majelis Syuro*, diakses dari [http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1613&Itemid=33](http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1613&Itemid=33), tanggal 4 Maret 2011.

*PKS Bantah Pragmatis*, diakses dari <http://female.kompas.com/read/2010/06/15/05030736/pks.bantah..pragmatis>, tanggal 4 Maret 2011.

*Diisukan Antek Wahabi, Hidayat: Saya dan PKS Bukan Wahabi*, diakses dari <http://us.detiknews.com/cpaging/2009/04/29/132930/1123240/700/2/2/hidayat-saya-dan-pks-bukan-wahabi>, tanggal 4 Maret 2011

*PKS Akui Pluralisme Indonesia*, diakses dari <http://bataviase.co.id/node/259942> Home, tanggal 4 Maret 2011

*Akankah PKS Mendirikan Negara Islam?*, diakses dari <http://www.reformata.com/index.php?m=news&a=view&id=2058>, tanggal 4 Maret 2011

*Akhirnya, PKS Terima Pancasila Dasar Negara*, diakses dari <http://www.inilah.com/read/detail/605041/akhirnya-pks-terima-pancasila-dasar-negara/>, tanggal 4 Maret 2011